

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAGIAN 1 PENGANTAR DINAMIKA KEBIJAKAN PUBLIK DI TENGAH TRANSFORMASI DIGITAL	1
A. PENDAHULUAN	1
B. IMPLEMENTASI <i>DIGITAL GOVERNANCE</i> DI INDONESIA.....	5
C. TRANSFORMASI DIGITAL AI MENUJU LAYANAN PEMERINTAH 5.0	7
D. TANTANGAN DAN PELUANG MENGGUNAKAN AI.....	7
E. TANTANGAN PEMERINTAH DI ERA 5.0 DALAM KONTEKS SPBE	8
F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	12
BAGIAN 2 TRANSFORMASI RUANG PUBLIK: DARI DISKURSUS KONVENSIONAL KE DIGITAL DALAM NARASI KEBIJAKAN PUBLIK	15
A. TRANSFORMASI RUANG PUBLIK DALAM DISKURSUS KEBIJAKAN PUBLIK.....	15
B. DIGITALISASI RUANG PUBLIK DAN DINAMIKA NARASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	20
C. INTEGRASI DISKURSUS KONVENSIONAL DAN DIGITAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	26
BAGIAN 3 KONSEP DAN TEORI NARASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	32
A. KONSEP DASAR NARASI.....	32
B. PENGERTIAN NARASI	32
C. FUNGSI NARASI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL	35

D. NARASI DALAM KEBIJAKAN PUBLIK.....	36
E. NARASI DALAM PROSES KEBIJAKAN PUBLIK	38
F. NARASI DALAM EVALUASI KEBIJAKAN	41
BAGIAN 4 MEDIA DIGITAL DAN PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK	43
A. TRANSFORMASI RUANG PUBLIK DAN EVOLUSI KOMUNIKASI POLITIK.....	43
B. TEORI AGENDA-SETTING DAN PEMBINGKAIAN NARATIF	44
C. ARSITEKTUR ALGORITMIK: GELEMBUNG FILTER DAN POLARISASI	45
D. NEUROKIMIA NARASI DIGITAL DALAM ADVOKASI KEBIJAKAN	46
E. ORKESTRASI AKTOR: INFLUENCER, AKTIVIS, DAN BUZZER.....	47
F. KEBIJAKAN PUBLIK REAKTIF DAN FENOMENA ISU VIRAL.....	47
G. ANALISIS KASUS KONTEMPORER 2024-2025	48
H. STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DI ERA POST-TRUTH	49
I. REGULASI DIGITAL DAN PERLINDUNGAN HAK PUBLIK	49
BAGIAN 5 AKTOR KEBIJAKAN DALAM EKOSISTEM DIGITAL.....	52
A. PENGANTAR.....	52
B. PERUBAHAN ARENA: MIGRASI OTORITAS KE RUANG SIBER.....	55
C. IDENTIFIKASI AKTOR BARU: DARI OTORITAS PAKAR KE DOMINASI INFLUENCER DAN ALGORITMA	58
D. NARASI SEBAGAI SENJATA: HEGEMONI PERSEPSI DALAM RUANG KEBIJAKAN DIGITAL	62
E. TANTANGAN NYATA: POPULISME VS TEKNOKRASI DALAM LANSKAP KEBIJAKAN DIGITAL.....	64
F. SOLUSI STRATEGIS: PARLEMEN DIGITAL YANG RESPONSIF	66

BAGIAN 6 MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KEBIJAKAN PUBLIK.....	68
A. PENGANTAR: DARI “SALURAN KOMUNIKASI” KE “ARENA KEBIJAKAN” MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KEBIJAKAN PUBLIK	68
B. MEDIA SOSIAL SEBAGAI “PUBLIC SPHERE” DIGITAL: JANJI PARTISIPASI DAN KOREKSI INFORMAL	71
C. SIAPA YANG DOMINAN DI ARENA? PERSPEKTIF STAKEHOLDER DAN “SALIENCE”	74
D. MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA KEBIJAKAN PUBLIK: DARI LISTENING KE TATA KELOLA YANG AKUNTABEL.....	76
BAGIAN 7 PARTISIPASI PUBLIK DAN E-DEMOKRASI	80
A. KONSEP PARTISIPASI PUBLIK DALAM ERA DIGITAL.....	80
B. E-DEMOKRASI SEBAGAI MODEL KETERLIBATAN WARGA	81
C. BENTUK DAN MEKANISME PARTISIPASI PUBLIK DIGITAL	83
D. DAMPAK PARTISIPASI DIGITAL TERHADAP PROSES KEBIJAKAN	85
E. TANTANGAN DAN BATASAN E-DEMOKRASI	86
BAGIAN 8 HAKEKAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DALAM ERA NARASI DIGITAL	89
A. HAKEKAT PERUMUSAN KEBIJAKAN DALAM ERA NARASI DIGITAL	89
B. NARASI DIGITAL SEBAGAI BAHAN FORMULASI MASALAH PUBLIK	91
C. INTEGRASI ASPIRASI DIGITAL DALAM PENYUSUNAN AGENDA KEBIJAKAN	93
D. TEKNIK MERANCANG ALTERNATIF KEBIJAKAN BERBASIS NARASI DIGITAL	97

E. TANTANGAN DAN RISIKO PERUMUSAN KEBIJAKAN BERBASIS NARASI DIGITAL.....	98
--	----

BAGIAN 9 IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN DI RUANG DIGITAL 100

A. KAREKTERISTIK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DI RUANG DIGITAL.....	100
B. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL.....	102
C. TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DI RUANG DIGITAL.....	105
D. EVALUASI, UMPAN BALIK, DAN PEMBELAJARAN KEBIJAKAN PUBLIK DI RUANG DIGITAL.....	107

BAGIAN 10 REGULASI PLATFORM DIGITAL DAN KEPENTINGAN PUBLIK..... 112

A. PENDAHULUAN	112
B. KONSEP DAN KAREKTERISTIK PLATFORM DIGITAL DAN IMPLEMENTASINYA BAGI TATA KELOLA PUBLIK	114
C. MAKNA KEPENTINGAN PUBLIK DI ERA DIGITAL.....	116
D. URGENSI REGULASI PLATFORM DIGITAL DAN RISIKO TANPA INTERVENSI KEBIJAKAN	117
E. MODEL DAN PENDEKATAN REGULASI PLATFORM DIGITAL DI TINGKAT GLOBAL	119
F. TANTANGAN IMPLEMENTASI REGULASI PLATFORM DIGITAL DI INDONESIA	121
G. PENUTUP: ARAH REGULASI PLATFORM DIGITAL BERBASIS KEPENTINGAN PUBLIK.....	123

BAGIAN 11 MASA DEPAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MASYARAKAT DIGITAL 125

A. PENDAHULUAN	125
B. TUJUAN DAN SIGNIFIKANSI	127
C. RELEVANSI PENELITIAN DAN KEBIJAKAN MASA DEPAN	128
D. DEFINISI DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK.....	129
E. TRANSFORMASI DIGITAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK	131
F. TANTANGAN DAN PELUANG	133
G. STUDI KASUS DAN ANALISIS: <i>E-GOVERNMENT</i> DI BERBAGAI NEGARA.....	134
H. INOVASI KEBIJAKAN DIGITAL	139
I. SIMPULAN.....	140

DAFTAR PUSTAKA 142

TENTANG PENULIS 167